BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Singkat Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 1905 – 1933, di zaman Belanda telah didirikan Departemen Bonandbouw Nijverheid Handel di Bogor. Dimana Departemen ini mengurus masalah pertanian, kerajinan dan perdagangan.

Pada zaman ini belum ada industri dan belum ada pemecahan antara bidang pertanian dan bidang perdagangan, sehingga ketiga bidang tersebut dimasukkan kedalam satu departemen. Pada tahun 1934 – 1942 terjadi perubahan Departemen Vanland Nijverheid Handel berubah menjadi Departemen Van Economiche Zaken yang berpusat di kota Jakarta.

Kemudian pada tahun 1942 – 1945 ketika Indonesia dalam masa penjajahan Jepang, Departemen Van Economiche Zaken tersebut berubah menjadi Zinu Kesal Kyoku yang berpusat di Jakarta. Baru ketika timbul pemerintah dualistis di Jakarta, yaitu Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah NICA maka Departemen tersebut dipindahkan ke Yogyakarta. Oleh karena itu, pada masa Kabinet Sutan Syahrir III, yang mana didalamnya terdapat perincian cabinet maka diadakanlah perubahan menjadi kementrian Perdagangan dan Perindustrian.

Pada tanggal 12 Maret 1946 kedua Kementrian itu mengelola bidangnya masing-masing yang mana pada saat itu Menteri Perdagangan dan Perindustrian adalah Ir. Dermawan Mangun Kusumo dengan wakilnya Syamsu Harja. Tetapi pada masa Kabinet Sutan Syahrir IV, kementrian tersebut bersatu menjadi Kementrian Kemakmuran yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 1946.

Pada masa Kabinet Dr. Hatta, telah terbentuk Kementerian dan distribusi makanan dimana yang menjadi menterinya adalah Ir. Kasino. Setelah adanya keputusan dari kedua belah pihak maka pada tanggal 19 desember 1949 dibentuk Zaken Kabinet dibawah kepemimpinan Dr. Hatta, dan inilah yang menjadi menteri kemakmurannya adalah Ir. H. Djuanda dan pada tanggal 5 september 1949 kementerian perdagangan dijabat oleh Ir. Ingkrawang sedangkan yang menjadi menteri muda perindustrian rakyatnya adalah Dr. Suharno.

Kemudian pada tanggal 10 November 1963 pada masa Kabinet Presidentil, telah dibentuk menteri Chairil Saleh, dimana termasuk diantaranya :

- Kementerian Perindustrian Dasar dan Pertambangan dibawah kepemimpinan Menteri Chairil Saleh.
- Kementerian Perindustrian Rakyat dibawah pimpinan Menteri Mayor Jenderal Aziz Saleh.

Demikianlah ringkasan bagaimana timbulnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan rakyat, dimana pada waktu itu sampai sekarang dianggap penting dalam pembangunan, sehingga menimbulkan spesialisasi didalam departemen-departemennya.

Pada tahun 1984 lahirlah undang-undang no.5/1984, tentang perindustrian dan hal ini merupakan landasan pokok bagi pembangunan indsutri dalam memasuki era industrialisasi dan globalisasi di Indonesia pada umumnya, dan Jawa Barat pada khususnya.

3.2 Struktur organisasi

A. Kepala dinas
B. Wakil Kepala Dinas
C. Bag. Tata usaha, membawahi :
    - Sub bagian kepegawaian
    - Sub bagian keuangan
    - Sub bagian umum
D. Subdinas Bina Program, membawahi :
    - Seksi data dan informasi
    - Seksi penyusunan program
    - Seksi evaluasi dan pelaporan

E. Subdinas Industri logam,kimia dan aneka :

- Seksi logam dan mesin
- Seksi kimia
- Seksi agro industry
- Seksi aneka industri

F. Subdinas Industri Kecil dan menengah, membawahi :

- Seksi kimia dan agro
- Seksi sandang dan kulit
- Seksi logam, mesin dan elektronika
- Seksi kerajinan

G. Subdinas perdagangan dalam negeri, membawahi :

- Seksi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen
- Seksi pendaftaran dan penyaluran
- Seksi sarana dan promosi dagang

H. Subdinas Perdagangan luar negeri, membawahi :

- Seksi ekspor hasil industri
- Seksi ekspor hasil non industri
- Seksi impor
- Seksi promosi dan kerjasama luar negeri

3.3 Uraian Tugas

A. Kepala Dinas

Tugas pokok dari kepala dinas yaitu memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dinas. Sedangkan fungsi dari kepala dinas antara lain:

- Penetapan kebijakan operasional di bidang perindustrian dan perdagangan
- Pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang perindustrian dan perdagangan.
- Fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas tugas di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan yang disesuaikan dengan perkembangan wilayah.

B. Wakil Kepala Dinas

Wakil kepala dinas mempunyai tugas pokok, yaitu membantukepala dinas dalam memimpin, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dinas. Sedangkan fungsi dari wakil kepala dinas antara lain :

- Pengkoordinasian dan pengendalian internal dalam rangka kegiatan teknis operasional.

- Pelaksanaan tugas tugas teknis operasional yang dilimpahkan oleh kepala dinas.

C. Bagian Tata Usaha

Tugas pokok tata Usaha adalah menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan umum. Fungsi dari bagian ini antara lain :

- Pengelolaan urusan kepegawaian
- Pengelolaan urusan keuangan
- Pengurusan rumah tangga, perlangkapan, surat menyurat dan kearsipan

1) Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang undangan. Sedangkan fungsinya antara lain :

- Penyiapan bahan penusunan rencana kebutuhan, pengadaan, mutasi, pengembangan disiplin dan penyelenggaraan disiplin dan kesejahteraan.
- Pelaksanaan teknis administrasi kepegawaian.
- Penyiapan bahan rancangan perundang undangan dan ketatalaksanaan.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Fungsi dari sub bagian ini sbb :

- Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin daerah.
- Pelaksanaan tekbnis administrasi keuangan.

3) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlangkapan dan umum serta perpustakaan dan kearsipan.

Sedangkan fungsinya antara lain :

- Pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, dan administrasi perjalanan dinas.
- Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan dinas.
- Pengelolaan perpustakaan dinas dan hubungan masyarakat

D. Subdinas Bina Program

Tugas pokok bagian ini adalah menyelenggarakan penyusunan rencana strategis di bidang perindustrian dan perdagangan, penyusunan program kerja dinas yang meliputi program pembangunan perindustrian dan perdagangan dan rencana strategis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di badang perindustrian dan perdagangan. Berikut Fungsinya :

- Penyusunan bahan pedoman teknis pengumpulan data dan penyebaran informasi.
- Penyusunan bahan pedoman teknis penyusunan program dan rencana strategi (Renstra).
- Penyusunan bahan teknis pembuatan pelaporan dan evaluasi.

1) Seksi data dan informasi

Seksi Data dan informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang perindustrian dan perdagangan. Fungsinya Sbb :

- Pengumpulan data dan informasi
- Penyusunan dan pemutakhiran data dan informasi

2) Seksi penyusunan Program

Seksi penyusunan program mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi bidang perindustrian dan perdagangan. Fungsinya antara lain :

- .Pengumpalan dan pengolahan data di bidang program kerja perindustrian dan perdagangan
- Penyiapan bahan pedoman teknis dan penyusunan program kerja dinas

3) Seksi evaluasi dan pelaporan

Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas.

Fungsinya sbb :

- Pengumpulan data pengolahan untuk pelaksanaan evaluasi
- Penyiapan bahan pembinaan teknis untuk evaluasi dan pelaporan

E. Subdinas Industri logam, kimia, dan aneka

Subdinas industri logam, kimia, dan aneka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijaksanaan operasional di bidang industri logam, kimia, dan aneka. Fungsinya sbb :

- Perumusan bahan kebijakan teknis operasional industri pengembangan usaha logam, kimia, dan aneka industri.
- Perumusan bahan fasilitasi pengembangan usaha industri logam, mesin, kimia
- Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan usaha industri logam, kimia

1. Seksi Logam Mesin

Seksi logam mesin mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional pengembangan usaha di bidang industri logam mesin. Fungsinya sbb :

- Pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengembangan industri logam dan mesin.
- Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pengembangan usaha industri logam dan mesin.

1. Seksi Kimia

Seksi kimia mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan usaha di bidang pengembangan industri kimia. Fungsinya antara lain :

- Pengumpulan dan prngolahan data kegiatan pengembangan usaha di bidang industri kimia.
- Penyusunsn bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pengembangan industri kimia.

2. Seksi Agro Industri

Seksi agro industri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunsn bahan kebijakan operasional pengembangan usaha di bidang agro industri.

Sementara fungsinya antara lain :

- Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pengembangan usaha di bidang agro industri.
- Penyusunan bahan kebijaksanaan operasional dan fasilitasi pengembangan usaha di bidang agro industri.

3. Seksi Aneka Industri

Seksi aneka industri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengembangan usaha di bidang aneka industri.

Fungsinya antara lain :

- Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pengembangan usaha di bidang aneka industri.
- Penyusunan bahan kebijaksanaan operasional dan fasilitasi pengembangan usaha di bidang aneka industri.

F. Subdinas Industri Kecil dan Menengah

Subdinas ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional pengembangan usaha di bidang industri kecil dan menengah. Fungsinya antara lain :

- Perumusan bahan kebijaksanaan operasional pengembangan usaha di bidang industri kecil dan menengah.
- Perumusan bahan fasilitasi pengembangan usaha industri kecil dan menengah.
- Penyelenggaraan fasilitas pengembangan usaha industri kecil dan menengah.

1) Seksi Kimia dan Agro

Seksi kimia dan agro mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional pengembangan usaha kimia dan agro. Fungsinya antara lain :

- Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pengembangan usaha di bidang industri kimia dan agro.
- Penyusunan bahan kebijakan operasional dan failitasi pengembangan usaha di bidang industri kimia dan agro.

2) Seksi sandang dan kulit

Seksi sandang dan kulit mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional di bidang IKM sandang dan kulit. Fungsinya antara lain :

- Penyusunan bahan kebijakan operasional pengembangan sarana, usaha, produksi, analisa iklim usaha serta pemantauan evaluasi.
- Apenyusunan bahan fasilitasi standardisasi dan supervise terhadap kebijaksanaan pengembangan sarana, usaha, produksi, dan peningkatan kerjasama di bidang IKM sandang dan kulit.

3) Seksi logam , mesin, dan elektronika

Seksi logam, mesin, dan elektronika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional di IKM logam, mesin, dan elektronika. Fungsinya antara lain :

- Penyusunan bahan kebijakan operasional dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha serta pemantauan dan evaluasi.
- Penyusunan bahan fasilitasi penerapan standardisasi dan supervise terhadap kebijakan pengembangan sarana, usaha, produksi, dan peningkatan kerjasama di bidang IKM logam, masin, dan elektronika.

4) Seksi Kerajinan

Seksi kerajinan mempinyai tugas pokok melaksanakan penyusunsn bahan kebijakan operasional di bidang IKM kerajinan, Fungsinya antara lain :

- Penyusunan bahan kebijakan operasional dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha serta pemantauan dan evaluasi di bidang kerajinan.
- Penyusunan bahan fasilitasi penerapan standardisasi dan supervise terhadap kebijakan pengembangan sarana, usaha, produksi dan peningkatan kerjasama di bidang IKM kerajinan.

G. Subdinas Perdagangan Dalam Negeri

Subdinas ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri. Fungsinya antara lain :

- Perumusan bahan kebijakan pengembangan usaha di bidang perdagangan dak\lam negeri.
- Perumusan bahan fasilitasi pengembangan perdagangan dan perlindungan konsumen dan penyaluran sarana dan peromosi dagang.
- Perumusan bahan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan dalam negeri.

1) Seksi usaha perdagangan dan erlindungan konsumen.

Seksimini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional di bidang usaha perdagangan dan perlindungan konsuman. Fungsinya antara lain :

- Penyusunan bahan petunjuk teknis dan fasilitasi pengembangan usaha perdagangan.
- Penyusunan bahan deseminasi sosialisasi dengan dunia usaha dalam rangka perlindungan konsumen.

2) Seksi pengadaan dan penyaluran

Seksi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional di bidang pengadaan dan penyaluran barang dan jasa. Fungsinya antara lain :

- Penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan pengadaan dan penyaluran barangdan jasa.
- Penyusunan bahan kegiatan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan instansi terkait.

3) Seksi pendaftaran perusahaan.

Seksi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional di bidang pendaftaran perusahaan. Fungsinya antara lain :

- Penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran perusahaan.
- Pelaksanaan penyusunan bahan kegiatan pemantauan dan evaluasi buku daftar perusahaan.

4) Seksi sarana promosi dagang.

Seksi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional di bidang sarana dan promosi perdagangan di dalam negeri.

Fungsinya antara lain :

- Penyusunan bahan fasilitasi pengembangan sarana dagang.
- Penyusunan bahan fasilitasi peningkatan promosi perdagangan dalam negeri.

H. Subdinas Perdagangan luar negeri

Subdinas ini mwmpunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional di bidang perdagangan luar negeri. Sedangkan fungsimya adalah :

- Penyusunan bahan petunjuk teknis dan fasilitasi di bidang perdagangan luar negeri.

- Perumusan bahan atau fasilitasi pengembangan ekspor, impor, dan pengawasan mutu barang ekspor.

- Perumusan hasil analisis iklim usaha di bidang perdagangan luar negeri.

1) Seksi ekspor hasil industri.

Seksi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional di bidang pengembangan ekspor hasil industri. Fungsinya antara lain :

- Penyusunan bahan petunjuk teknis dan fasilitasi pengembangan sarana ekspor hasil industri, iklim usaha dan system informasi ekspor hasil industri.
- Penyusunan bahan fasilitasi program kerjasama dengan dunia usaha dalam ekspor hasil industri.

2) Seksi ekspor hasil non industri.

Seksi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional pengembangan di bidang ekspor hasil non industri. Fungsinya antara lain :

- Penyusunan bahan fasilitasi pengembangan sarana ekspor hasil non industri, iklim usaha dan system informasi ekspor hasil non industri.

- Penyusunan bahan fasilitasi peningkatan kerjasama dangan dunia usaha dalam ekspor hasil non industri.

3) Seksi impor.

Seksi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional di bidang pengembangan impor. Fungsinya antara lain :

- Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan impor terhadap dunia usaha.
- Pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian kebijakan impor dalam rangka pengawasan mutu.

4) Seksi promosi dan kerjasama Luar negeri

Seksi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijaksanaan operasional di bidang promosi dan kerjasama luar negeri. Fungsinya antara lain :

- Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan promosi dan kerjasama luar negeri.
- Pelaksanaan penyusunan bahan pemantauan kegiatan promosi dan kerjasama luar negeri (multilateral, regional, dan bilateral).

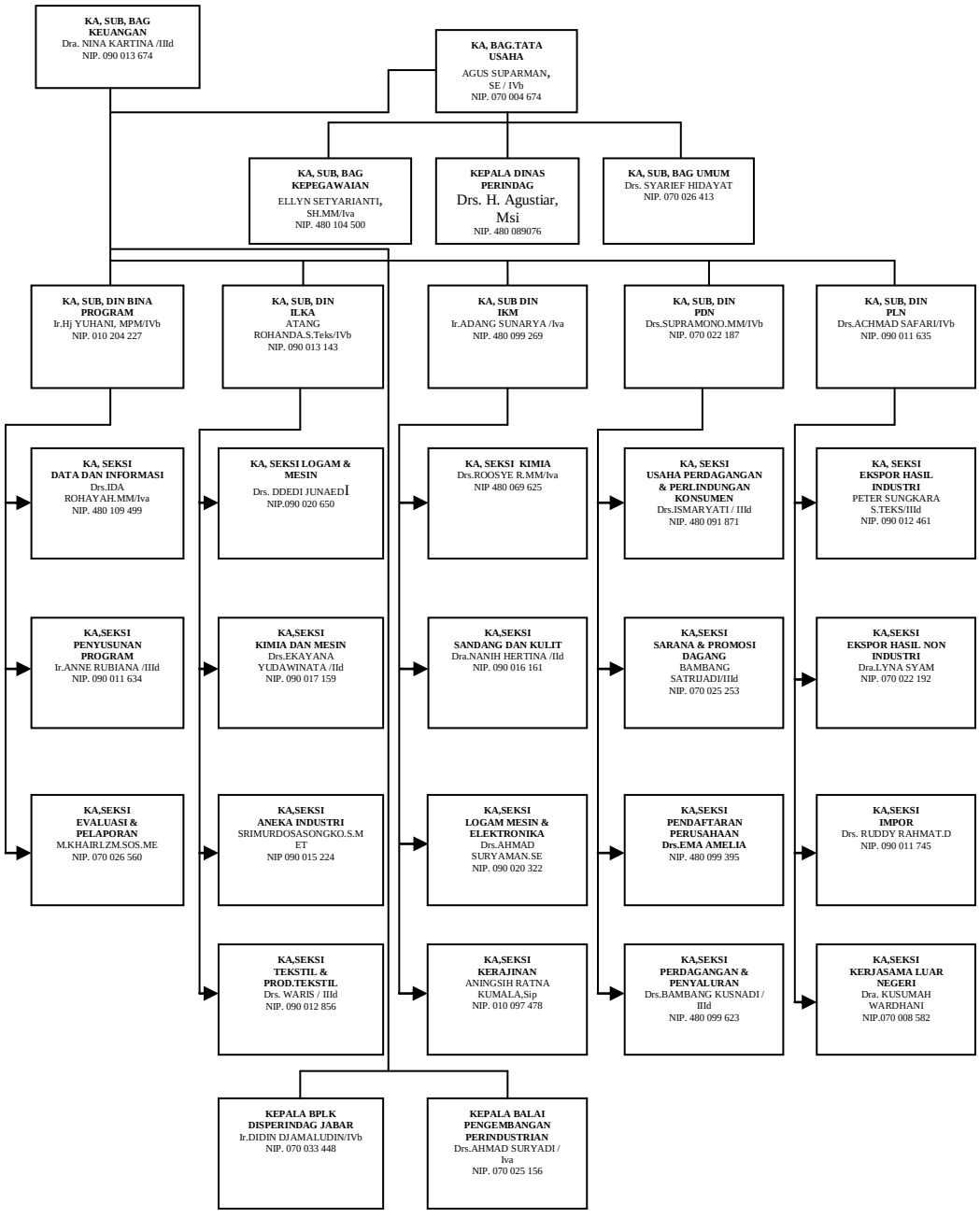
3.4 Aspek kegiatan Perusahaan

Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan umum dan tugas pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang industri dan perdagangan.

Aspek Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

1. Penyusunan kebijaksanaan teknis di sector industri dan perdagangan.
2. Pemberian pelayanan pemerintah dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kab./Kota di sektor industri dan perdagangan.
3. Memfasilitasi, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembinaan lainnya.
4. Pembinaan teknis di sektor industri dan perdagangan lintas Kab./Kota
5. Pembinaan unit pelayanan teknis dinas
6. Pengembangan sistim informasi.
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

Struktur Organisasi Perindag



Gambar 3.1